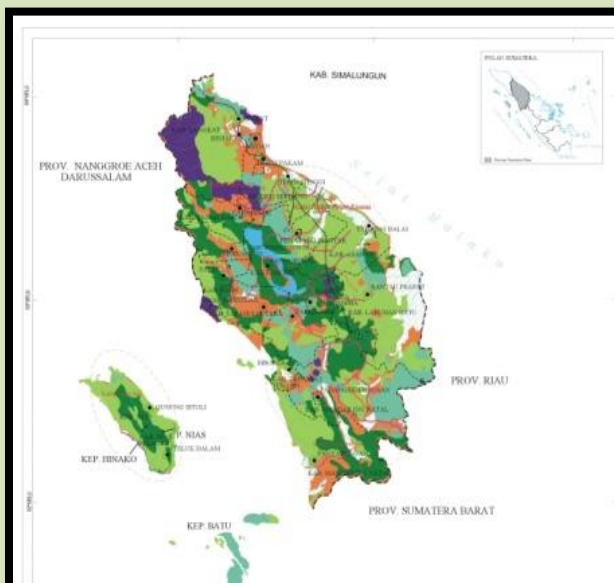


RENCANA KERJA (Perubahan)

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara
Jl. William Iskandar No. 9 Telp. (061) 6619431 Fax. (061) 6623480 Medan
www.distarukim.sumutprov.go.id email : distarukim@sumutprov.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 mempunyai arti strategis karena di dalamnya memuat uraian program dan kegiatan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2016, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Medan,

2017

Plt. KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



Ir. IDA MARIANA, MSi
PEMBINA TINGKAT SATU
NIP. 19601125 199203 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Normatif.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renja SKPD.....	8
2.2. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD..	10
2.3. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	10
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	11
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional	11
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	12
3.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017	13
BAB IV PENUTUP.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara merupakan SKPD baru yang menyesuaikan dengan SOTK, dahulu merupakan bagian dari Dinas Penataan Ruang dan Permukiman, adalah dokumen rencana pembangunan SKPD untuk Tahun 2017 yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai instansi teknis di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

Renja SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dalam mendukung pelaksanaan tugas Gubernur Sumatera Utara dengan tetap mengacu kepada RPJM Nasional dan Daerah sebagai landasan dan dokumen perencanaan nasional dan daerah secara menyeluruh berdasarkan kondisi daerah Sumatera Utara.

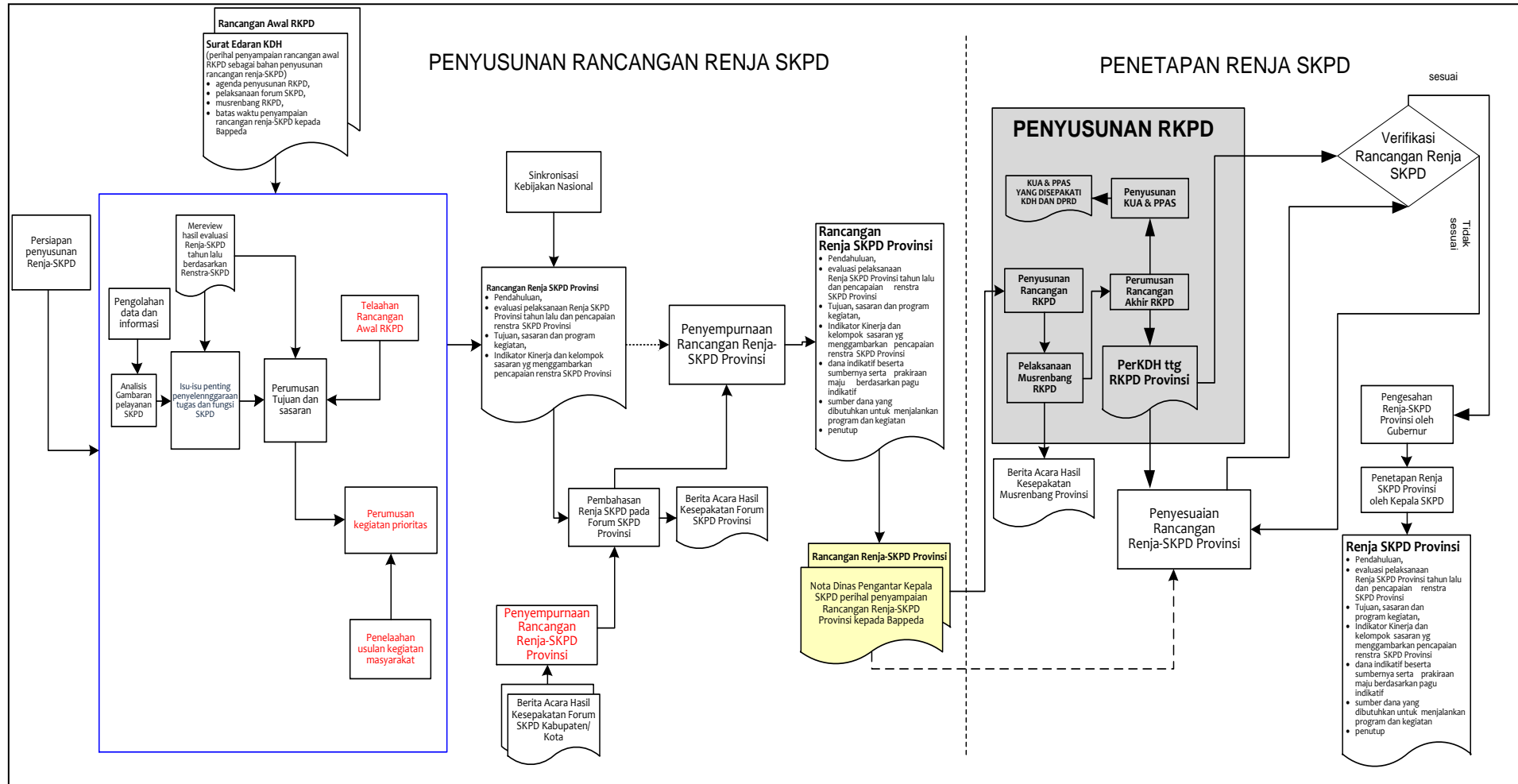
Dalam penyusunan Renja dipertimbangkan faktor-faktor yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi melalui SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara mempunyai kewenangan dalam Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi Rumah Umum, Rumah Swadaya, Kawasan Permukiman dan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU).

Sebagai instansi teknis dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Rencana Kerja tahun 2017 merupakan rencana kerja pemerintah daerah ketiga dari pelaksanaan visi dan misi gubernur terpilih dan harus mengacu kepada Permendagri 54 tahun 2010 yang mengatur mengenai sasaran pokok / arah kebijakan RPJMD tahap III tahun 2014 - 2018.

Pada tahun 2017 tema yang diusung adalah ***“KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)”***.

Tahapan penyusunan Renja SKPD dapat digambarkan dalam bagan alir sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Provinsi



Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pada tahun 2017 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) 2014-2018. Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menyusun Rencana Kerja Tahun 2017. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.

B. LANDASAN NORMATIF

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Distarukim Provinsi Sumatera Utara adalah :

- Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun,
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Tahapan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah untuk memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah untuk mewujudkan visi, misi dan program yang telah disusun oleh Gubernur Sumatera Utara dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.

D. SISTIMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tahun 2017, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab – I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum dan maksud serta tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

- Bab – II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD
Berisikan evaluasi dan analisa serta issu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- Bab – III : Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan
Berisi mengenai tujuan dan sasaran serta program SKPD TA. 2017
- Bab – IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENJA SKPD

Tahun Anggaran 2015 Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara mengelola dana sebesar Rp. 123.384.810.443,- yang terdiri dari belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 36.334.458.000,- dan belanja Langsung sebesar Rp. 87.050.352.443,-.

Hasil yang telah dicapai pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2015 adalah :

1. Belanja Langsung yang telah dicapai adalah sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kinerja sumber daya manusia dan aparatur pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman.
 - b. Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan pekerjaan baik yang bersifat fisik maupun non fisik.
2. Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk pembayaran gaji dan kelancaran pelaksanaan tugas staf Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara

Pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

1. Terbangunnya saluran drainase sepanjang 466.158 meter, adapun dengan terbangunnya saluran ini hasil yang dirasakan oleh masyarakat adalah berkurangnya daerah genangan pada kawasan perumahan/permukiman yang berada disepanjang jaringan drainase yang dibangun.
2. Terbangunnya jalan poros kawasan agropolitan sepanjang 25.000 meter, adapun dengan terbangunnya jalan poros adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan mempermudah pengumpulan hasil pertanian pada kawasan agropolitan.

3. Terbangunnya prasarana dan sarana air bersih / air minum sepanjang 3.827,2 meter, adapun dengan terbangunnya prasarana dan sarana air bersih / air minum ini hasil yang dirasakan masyarakat adalah mudahnya mendapatkan air bersih.
4. Rehabilitasi dan perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sebanyak 1000 unit.
5. Terselenggaranya koordinasi dan pembangunan pembangunan perumahan/permukiman serta peningkatan sumber daya manusia dalam bidang penataan ruang dan permukiman.
6. Terselenggarakannya pembangunan berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2015 dana yang telah terserap belanja langsung untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 84.071.022.839 (96,58 %) adapun realisasi kegiatan fisik sebesar 97,03%.

Untuk Tahun Anggaran 2016, Dinas Penataan Ruang dan Permukiman mengelola dana sebesar Rp. 101.379.035.500,- yang terbagi dalam berbagai kegiatan dalam 7 (tujuh) Program Strategis yaitu :

- a. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Air Minum Dan Sanitasi Lingkungan sebesar Rp. 40.850.000.000,-
- b. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman sebesar Rp. 22.710.000.000,-
- c. Program Pembinaan Dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman sebesar Rp. 15.700.000.000,-
- d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bangunan Gedung sebesar Rp. 8.141.315.000,-
- e. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah sebesar Rp. 3.750.000.000,-
- f. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh sebesar Rp. 400.000.000,-
- g. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebesar Rp. 1.600.000.000,-

B. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Kondisi umum yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara pada saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan baik dari aspek ekonomi, sosial, kondisi prasarana dan sarana serta munculnya berbagai bencana alam yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maka terdapat beberapa isu strategis antara lain sebagai berikut :

1. Adanya kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat.
2. Tingginya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi terutama pada kawasan perkotaan.
3. Masih banyaknya masyarakat yang tinggal pada rumah tidak layak huni.
4. Terbatasnya prasarana dan sarana perumahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

C. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program yang diusulkan merupakan program dan kegiatan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan di Sumatera Utara sesuai dengan Visi dan Misi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Usulan program dan kegiatan ini merupakan bagian dari pencapaian target yang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Utara.

Usulan program ini juga merupakan perwujudan dari usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, pemerintah kabupaten/kota melalui Musrenbang, serta usulan dari hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan urusan wajib di setiap tingkatan pemerintahan. Hal ini berimplikasi pada peningkatan arti penting urusan perumahan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Daerah dituntut untuk mempedomani setiap peraturan perundangan yang telah disusun, serta menindaklanjuti dengan kebijakan dan program di tingkat daerah. Adapun peraturan perundangan yang dimaksud meliputi:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
3. Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat no. 22 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.

Peraturan dan perundangan di atas memiliki implikasi dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Utara. Pertama, Pemerintah Provinsi dituntut untuk menyusun kebijakan dan program yang efektif dan terukur yang tertuang dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan gubernur serta RPJP maupun RPJM. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyusun dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dimana keduanya memuat materi tentang perumahan dan kawasan permukiman. Meskipun demikian keduanya juga masih dalam proses untuk menjadi peraturan daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi juga dituntut untuk menyelenggarakan program yang sejalan dengan kebijakan dan program Pemerintah Pusat. Sejauh ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyelenggarakan beberapa program. Dalam konteks penyediaan rumah/hunian, Pemerintah Provinsi menyelenggarakan program Rehabilitasi Tidak Layak Huni, yang ditujukan bagi rumah tangga yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini dimaksudkan dalam rangka mendorong Program 100-0-100. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyelenggarakan program penyediaan rumah umum dalam bentuk pembangunan perumahan rumah tapak di Kabupaten Deli Serdang. Dalam konteks pembangunan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh serta Pembangunan PSU di Perumahan MBR. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyediakan anggaran untuk fasilitasi program-program Pemerintah di daerah.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Membangun prasarana dan sarana permukiman pada kawasan lintas kabupaten / kota.
2. Membangun kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
3. Menyusun kebijakan dan pedoman dalam bidang perumahan adalah :
 - a. Terlaksananya penyusunan dan sosialisasi norma, standard, pengaturan, dan manual (NSPM) dalam pembangunan bidang penataan ruang dan permukiman.
 - b. Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan bidang penataan ruang dan permukiman.

- c. Terbangunnya prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan terutama drainase dan jalan poros pada kawasan agropolitan di Sumatera Utara.
- d. Tersedianya rencana rinci kawasan strategis di Sumatera Utara.
- e. Terbangunnya jaringan drainase di Sumatera Utara.
- f. Terbangunnya dan terpeliharanya jalan lingkungan di Sumatera Utara.
- g. Terbangunnya jalan poros kawasan agropolitan/agromarinepolitan di Sumatera Utara.
- h. Tersedianya prasarana dan sarana lingkungan permukiman di Sumatera Utara.
- i. Tersedianya rencana rinci sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan

C. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara diterjemahkan pada misi pembangunan Sumatera Utara tahun 2013 – 2018 menyatakan :

- a. Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima (*good governance and clean government*).
- b. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi.
- c. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
- d. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.

- e. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dari kelima misi Daerah Provinsi Sumatera Utara tersebut maka misi ketiga dan keempat adalah misi yang diemban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yaitu **Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional** dan **Meningkatkan kualitas Pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah** dengan cara menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standard hidup layak, setara dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada peningkatan pelayanan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, telematika, rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

1. Jumlah program dan kegiatan

Program kegiatan strategis dinas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terbagi kedalam 2 (dua) program yaitu :

- Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur penataan lingkungan permukiman sebesar Rp. 60.142.200.000,-
- Program pembinaan dan pengembangan perumahan dan permukiman sebesar Rp. 22.963.786.000,-

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Penyebaran program dilakukan di Sumatera Utara, dengan sifat penyebaran sebagai berikut :

- Kawasan lingkungan perumahan dan permukiman tersebar di Sumatera Utara serta pada kawasan kumuh
- Kawasan strategis sesuai RTRW Provinsi
- Kawasan lintas kabupaten/kota

3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut penggunaan dananya

Kebutuhan dana Tahun 2017 sebesar Rp. 90.841.141.000,- (*sembilan puluh milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah*), terdiri atas Pembiayaan program kegiatan strategis Dinas sebesar Rp. 83.105.986.000,- (*delapan puluh tiga milyar seratus lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) dan program pendukung sebesar Rp. 7.735.155.000,- (*tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah*) yang dituangkan kedalam Program Pembangunan sesuai dengan RKPD Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

PENUTUP

Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan berjalan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan pembangunan daerah yang bersifat langsung berdampak kepada masyarakat.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 dapat mensinergikan dengan program dan kegiatan kabupaten/kota dan stakeholder - stakeholder yang lain yang mendukung pada pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Sumatera Utara.

Medan, 2017
Pit. KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Ir. IDA MARIANA, MSi
PEMBINA TINGKAT SATU
NIP. 19601125 199203 2 001

LAMPIRAN

1. Rencana Kerja 2017.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 5 1	Urusan Wajib				87,376,141,000				
1 5 1	Penataan Ruang								
1 5 1 1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				87,376,141,000				
1 5 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			1,902,125,000				2,187,443,750
1 5 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terkirimnya surat - surat dinas	Sumatera Utara	100%	19,680,000	APBD		100%	22,632,000
1 5 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Terpenuhinya Utilitas Kantor	Sumatera Utara	100%	840,000,000	APBD		100%	966,000,000
1 5 1 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	terlaksananya kebersihan ruangan	Sumatera Utara	100%	60,000,000	APBD		100%	69,000,000
1 5 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya ATK kantor	Sumatera Utara	100%	37,300,000	APBD		100%	42,895,000
1 5 1 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak kantor	Sumatera Utara	100%	72,149,000	APBD		100%	82,971,350
1 5 1 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan listrik dan elektronik	Sumatera Utara	100%	33,696,000	APBD		100%	38,750,400
1 5 1 15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bacaan dan informasi berita	Sumatera Utara	100%	24,000,000	APBD		100%	27,600,000
1 5 1 17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya konsumsi pendukung kegiatan harian	Sumatera Utara	100%	172,664,000	APBD		100%	198,563,600
1 5 1 18	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi kegiatan	Sumatera Utara	100%	410,556,000	APBD		100%	472,139,400
1 5 1 19	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi kegiatan	Sumatera Utara	100%	232,080,000	APBD		100%	266,892,000
1 5 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			4,229,960,000				4,864,454,000
1 5 1 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya sarana transportasi aparatur	Sumatera Utara	100%	141,400,000	APBD		100%	162,610,000
1 5 1 7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya prasarana dan sarana aparatur	Sumatera Utara	100%	1,513,800,000	APBD		100%	1,740,870,000
1 5 1 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya prasarana dan sarana aparatur	Sumatera Utara	100%	1,951,800,000	APBD		100%	2,244,570,000
1 5 1 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	meningkatkan pelayanan operasional transportasi kantor	Sumatera Utara	100%	322,960,000	APBD		100%	371,404,000
1 5 1 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya kondisi dan kualitas bangunan gedung kantor Dinas	Sumatera Utara	100%	300,000,000	APBD		100%	345,000,000
1 5 1 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			585,000,000				672,750,000
1 5 1 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapan	Sumatera Utara	100%	585,000,000	APBD		100%	672,750,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5	1	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur			320,000,000				368,000,000
1	5	1	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya kegiatan pelatihan	Sumatera Utara	100%	320,000,000	APBD		100%	368,000,000
1	5	1	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tersosialisasikannya peraturan perundangan bagi pegawai dinas PKP	Sumatera Utara	100%	-	APBD		100%	-
1	5	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kinerja sistim pelaporan			733,070,000				843,030,500
1	5	1	5	Penyusunan Laporan Neraca Dan Sistim Pembukuan	Tersedianya buku laporan keuangan	Sumatera Utara	100%	123,800,000	APBD		100%	142,370,000
1	5	1	6	Kegiatan Pembinaan Dan Pengelolaan Barang/Asset Dan Neraca Pada SKPD	Tersedianya buku laporan Barang/Aset	Sumatera Utara	100%	132,000,000	APBD		100%	151,800,000
1	5	1	7	Pengembangan Pengelolaan Informasi SKPD dan Operasional PPID	Tersedianya pelayanan infomasi publik	Sumatera Utara	100%	177,170,000	APBD		100%	203,745,500
1	5	1	8	Penyusunan LK Dan PK 2017	Laporan LK, PK, LPPD dan LKPJ	Sumatera Utara	100%	55,600,000	APBD		100%	63,940,000
1	5	1	9	Monitoring Dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Distarukimsu Tahun 2017	Meningkatnya kualitas perencanaan program SKPD	Sumatera Utara	100%	159,500,000	APBD		100%	183,425,000
1	5	1	10	Penyusunan Program Dan Kegiatan TA 2018	Tersedianya Rencana Program SKPD	Sumatera Utara	100%	85,000,000	APBD		100%	97,750,000
1	5	1	23	Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur penataan lingkungan permukiman				60,142,200,000				69,163,530,000
1	5	1	1	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Relokasi Korban Bencana Provinsi Erupsi Gunung Sinabung di Kawasan Merek	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		2 Ha	2,000,000,000	APBD	Penanggulangan Bencana Alam Gunung Sinabung	2 Ha	2,300,000,000
1	5	1	2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Batu Bara	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		0,5 Ha	600,000,000	APBD	Reses Dewan	0,5 Ha	690,000,000
1	5	1	3	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Samosir	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		1 Ha	1,000,000,000	APBD	Reses Dewan (F Demokrat)	1 Ha	1,150,000,000
1	5	1	4	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Ku	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		0,5 Ha	600,000,000	APBD		0,5 Ha	690,000,000
1	5	1	5	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Humbang Hasundutan	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		3 Ha	3,100,000,000	APBD	Reses Dewan (F Demokrat)	3 Ha	3,565,000,000
1	5	1	6	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Tapanuli Tengah	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		0,5 Ha	500,000,000	APBD		0,5 Ha	575,000,000
1	5	1	7	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Tanjung Balai	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		0,5 Ha	600,000,000	APBD	Reses Dewan (F PKB)	0,5 Ha	690,000,000
1	5	1	8	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Padang sidempuan	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		0,5 Ha	600,000,000	APBD		0,5 Ha	690,000,000
1	5	1	9	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Perbatasan Dairi Pakpak Barat	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		0,5 Ha	500,000,000	APBD		0,5 Ha	575,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5	1	10	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Medan	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		1,5 Ha	1,650,000,000	APBD	Reses Dewan (F PKB)	1,5 Ha	1,897,500,000
1	5	1	11	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Nias Barat	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		1 Ha	1,000,000,000	APBD		1 Ha	1,150,000,000
1	5	1	12	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Nias Selatan	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		1,5 Ha	1,500,000,000	APBD	Reses Dewan (F PKB)	1,5 Ha	1,725,000,000
1	5	1	13	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Deli Serdang	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		1 Ha	1,200,000,000	APBD	Reses Dewan (F PKB)	1 Ha	1,380,000,000
1	5	1	14	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Labuhan Batu	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		0,5 Ha	500,000,000	APBD	Reses Dewan	0,5 Ha	575,000,000
1	5	1	15	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Nias Utara	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		0.7 Ha	750,000,000	APBD	Reses Dewan	0.7 Ha	862,500,000
1	5	1	16	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Binjai	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		0,5 Ha	450,000,000	APBD	Reses Dewan	0,5 Ha	517,500,000
1	5	1	17	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Karo	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		1,7 Ha	1,750,000,000	APBD	Reses Dewan (F PG)	1,7 Ha	2,012,500,000
1	5	1	18	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Simalungun	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		1,5 Ha	3,000,000,000	APBD	Reses Dewan (Jantogu)	1,5 Ha	3,450,000,000
1	5	1	20	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Serdang Bedagai	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		1 Ha	1,000,000,000	APBD	Reses Dewan (F PKB)	1 Ha	1,150,000,000
1	5	1	21	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Langkat	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		1 Ha	1,000,000,000	APBD	Reses Dewan (F PKB)	1 Ha	1,150,000,000
1	5	1	22	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Tebing Tinggi	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		0,7 Ha	750,000,000	APBD	Reses Dewan (F PKB)	0,7 Ha	862,500,000
1	5	1	23	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kota Pematang Siantar	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		1 Ha	1,000,000,000	APBD	Reses Dewan (F PKB)	1 Ha	1,150,000,000
1	5	1	24	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Mandailing Natal	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		2 Ha	2,000,000,000	APBD	Reses Dewan (F Demokrat)	2 Ha	2,300,000,000
1	5	1	25	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Padang Lawas Utara	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		1 Ha	1,000,000,000	APBD	Reses Dewan (F Demokrat)	1 Ha	1,150,000,000
1	5	1	26	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Labuhan Batu Utara	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		0,5 Ha	500,000,000	APBD	Reses Dewan (F Demokrat)	0,5 Ha	575,000,000
1	5	1	28	Pembangunan PSU Permukiman PNS/ MBR Kab. Nias	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		0,5 Ha	500,000,000	APBD		0,5 Ha	575,000,000
1	5	1	29	Pembangunan PSU Permukiman Kab. Padang Lawas	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		0,5 Ha	500,000,000	APBD		0,5 Ha	575,000,000
1	5	1	30	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Deli Serdang	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh (kws percut)		8 Ha	8,100,000,000	APBD	Reses Dewan (F PG)	8 Ha	9,315,000,000
1	5	1	31	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Serdang Bedagai	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		3 Ha	3,000,000,000	APBD	Reses Dewan (F PG)	3 Ha	3,450,000,000
1	5	1	32	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Langkat	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		2 Ha	2,100,000,000	APBD		2 Ha	2,415,000,000
1	5	1	33	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kota Tanjung Balai	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		1,5 Ha	1,500,000,000	APBD	Reses Dewan (F PG)	1,5 Ha	1,725,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	5	1	34	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Labuhan Batu	Berkurangnya Kumuh	Luas	Kawasan		1,5 Ha	1,500,000,000	APBD	Reses Dewan (F PG)	1,5 Ha	1,725,000,000
1	5	1	35	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Labuhan Batu Selatan	Berkurangnya Kumuh	Luas	Kawasan		1 Ha	1,000,000,000	APBD	Reses Dewan (F PG)	1 Ha	1,150,000,000
1	5	1	36	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Labuhan Batu Utara	Berkurangnya Kumuh	Luas	Kawasan		1,5 Ha	1,500,000,000	APBD	Reses Dewan (F PG)	1,5 Ha	1,725,000,000
1	5	1	38	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Asahan	Berkurangnya Kumuh	Luas	Kawasan		1 Ha	1,000,000,000	APBD	Reses Dewan (F PKB)	1 Ha	1,150,000,000
1	5	1	39	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Batu Bara	Berkurangnya Kumuh	Luas	Kawasan		1 Ha	1,000,000,000	APBD	Reses Dewan (F PKB)	1 Ha	1,150,000,000
1	5	1	40	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Simalungun	Berkurangnya Kumuh	Luas	Kawasan		0,7 Ha	750,000,000	APBD	Reses Dewan (F PKB)	0,7 Ha	862,500,000
1	5	1	41	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kota Binjai	Berkurangnya Kumuh	Luas	Kawasan		1 Ha	1,000,000,000	APBD	Reses Dewan (F PKB)	1 Ha	1,150,000,000
1	5	1	42	Koordinasi dan Perencanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sumatera Utara	Berkurangnya Kumuh	Luas	Kawasan		1	265,500,000	APBD		100%	305,325,000
1	5	1	43	Monitoring, evaluasi dan Pengawasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sumatera Utara	Berkurangnya Kumuh	Luas	Kawasan		100%	324,100,000	APBD		100%	372,715,000
1	5	1	44	Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan PSU Permukiman Provinsi Sumatera Utara	Berkurangnya Kumuh	Luas	Kawasan		100%	265,500,000	APBD		100%	305,325,000
1	5	1	45	Monitoring, evaluasi dan Pengawasan Pembangunan PSU Permukiman Provinsi Sumatera Utara	Berkurangnya Kumuh	Luas	Kawasan		100%	287,100,000	APBD		100%	330,165,000
1	5	1	46	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Lintas Pematang Siantar - Simalungun	Berkurangnya Kumuh	Luas	Kawasan		1 Ha	1,000,000,000	APBD	Tambahan Evaluasi Mendagri (15 M)	1 Ha	1,150,000,000
			47	Pembangunan PSU Permukiman MBR Kab. Mandailing Natal	Berkurangnya Kumuh	Luas	Kawasan		1 Ha	1,000,000,000		Tambahan Evaluasi Mendagri (15 M)	1 Ha	1,150,000,000
			48	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Toba Samosir	Berkurangnya Kumuh	Luas	Kawasan		1 Ha	1,000,000,000		Tambahan Evaluasi Mendagri (15 M)	1 Ha	1,150,000,000
			49	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Pakpak barat	Berkurangnya Kumuh	Luas	Kawasan		1 Ha	1,000,000,000		Tambahan Evaluasi Mendagri (15 M)	1 Ha	1,150,000,000
			50	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Padang Lawas	Berkurangnya Kumuh	Luas	Kawasan		1 Ha	1,000,000,000		Tambahan Evaluasi Mendagri (15 M)	1 Ha	1,150,000,000
			51	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Gunung Sitoli	Berkurangnya Kumuh	Luas	Kawasan		1 Ha	1,000,000,000		Tambahan Evaluasi Mendagri (15 M)	1 Ha	1,150,000,000
			52	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kab. Tapanuli Tengah	Berkurangnya Kumuh	Luas	Kawasan		1 Ha	1,000,000,000		Tambahan Evaluasi Mendagri (15 M)	1 Ha	1,150,000,000
1	5	1	24	<i>Program pembinaan dan pengembangan perumahan dan permukiman</i>						19,463,786,000				22,383,353,900
1	5	1	1	Pembuatan Stand Pameran pada Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Medan Fair Tahun 2017	Tersusun dan dapat disosialisasikan perkim				1 Keg	341,112,300	APBD		1 Keg	392,279,145
1	5	1	2	Pembuatan Stand Pameran pada Pekan Lingkungan Hidup Indonesia di Jakarta dan Pameran Lingkungan Hidup Sumatera Utara di Medan Tahun 2017	Tersusun dan dapat disosialisasikan perkim				2 Keg	325,480,000	APBD		2 Keg	374,302,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5	1	3	Pembuatan Stand Pameran pada Pekan Inovasi Sumut 2017 dan Investment, Trade and Tourism of North Sumatera (ITT of North Sumatera) 2017	Tersusun dan dapat disosialisasikan NSPM bidang perkim		1 Keg	170,750,000	APBD		1 Keg	196,362,500
1	5	1	4	Penyuluhan bagi Masyarakat dalam rangka pemanfaatan budaya tinggal di Rumah Susun di Provsu	Tersusun dan dapat disosialisasikan NSPM bidang perkim		1 Keg	257,200,000	APBD		1 Keg	295,780,000
1	5	1	5	Pilot proyek pembangunan infrastruktur permukiman perdesaan di Desa Binaan PKK Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman		2 Lokasi	732,350,200	APBD		2 Lokasi	842,202,730
1	5	1	6	Workshop dan Sosialisasi Peringatan Hari habitat sedunia di provinsi sumatera utara	Tersedianya acuan pembangunan PSU		1 Keg	490,800,000	APBD		1 Keg	564,420,000
1	5	1	7	Koordinasi Pembangunan kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman di Provsu	Meningkatnya kualitas pembangunan perumahan		100%	229,085,000	APBD		100%	263,447,750
1	5	1	8	Monitoring SPM Bidang Perumahan di Provsu	Meningkatnya kualitas pembangunan perumahan		100%	131,685,000	APBD		100%	151,437,750
1	5	1	10	Sosialisasi Perancangan Kebijakan Penyediaan Kasiba dan Lisiba lintas Kab/Kota di Sumatera Utara	Terselenggaranya Sosialisasi Perancangan Kebijakan Penyediaan Kasiba dan Lisiba lintas Kab/Kota di Sumatera Utara		1 Keg	192,750,000	APBD		1 Keg	221,662,500
1	5	1	11	Realisasi Kesepakatan Penyediaan Kasiba dan Lisiba Litas Kab/Kota melalui penandatanganan MOU dan PKS antar Pemerintah Prov dan Kab/kota dan Unsur terkait bidang Perumahan	MOU dan PKS Penyediaan Kasiba dan Lisiba Litas Kab/Kota		1 Keg	188,000,000	APBD		1 Keg	216,200,000
1	5	1	12	Rehabilitasi Rumah tidak layak huni diluar kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara	Terehabilitasinya Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni di Sumatera Utara		300 unit	7,500,000,000	APBD		300 unit	8,625,000,000
1	5	1	14	Rehabilitasi Rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka dukungan Hari Keluarga Nasional	Terehabilitasinya Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni di Sumatera Utara		34 Unit	989,200,000	APBD		34 Unit	1,137,580,000
1	5	1	16	Pengembangan Kelembagaan Perumahan dan Kws.Permukiman (POKJA PKP)	Meningkatnya koordinasi pengembangan perumahan		1 Tahun	195,314,000	APBD		1 Tahun	224,611,100
1	5	1	16	Penyediaan Informasi Perumahan dan Kws. Permukiman (Penyediaan Rumah MBR, KPR, sistem Pembiayaan, Perbankan, Assosiasi Pengembang Perumahan)	Leaflet, Brosur, Banner, Booklet, CD, Video tentang Perumahan dan Kws. Permukiman		1 Paket	220,059,500	APBD		1 Paket	253,068,425
1	5	1	17	Identifikasi dan pemutakhiran data perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya kualitas pembangunan Permukiman		1 Laporan	500,000,000	APBD		1 Laporan	575,000,000
1	5	1	18	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) di Provsu (Sei Mangke, Danau Toba, Mebidang)	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		3 Kws	1,500,000,000	APBD	Tambahan Evaluasi Mendagri (15 M)	3 Kws	1,725,000,000
1	5	1	19	Pembangunan Rumah Relokasi Pengungsi Gunung Sinabung	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		48 Unit	3,000,000,000	APBD	Tambahan Evaluasi Mendagri (15 M)	48 Unit	3,450,000,000
1	5	1	20	Penyusunan Profil Kawasan Kumuh di PKW Provinsi (Tobasa, Lab. Batu, Asahan, Dairi, P. Siantar)	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh		5 Kws	2,500,000,000	APBD	Tambahan Evaluasi Mendaqri (15 M)	5 Kws	2,875,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 5 1	Rehabilitasi Rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka dukungan Hari Keluarga Nasional	Terehabilitasinya Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni di Sumatera Utara		40 Unit	1.000.000.000	APBD		40 Unit	1.150.000.000
1 5 1	Pengembangan Kelembagaan Perumahan dan Kws. Perumahan (POKJA PKP)	Meningkatnya koordinasi pengembangan perumahan		1 Tahun	200.000.000	APBD		1 Tahun	230.000.000
1 5 1	Penyediaan Informasi Perumahan dan Kws. Perumahan (Penyediaan Rumah MBR, KPR, sistem Pembiayaan, Perbankan, Asosiasi Pengembangan Perumahan, dll)	Leaflet, Brosur, Banner, Booklet, CD, Video tentang Perumahan dan Kws. Perumahan		1 Paket	250.000.000	APBD		1 Paket	287.500.000
1 5 1	Identifikasi dan pemutakhiran data perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya kualitas pembangunan Perumahan		1 Laporan	500.000.000	APBD		1 Laporan	575.000.000

Medan, 2017
 Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 PROVINSI SUMATERA UTARA



Ir. IDA MARIANA, MSi
 PEMBINA TINGKAT SATU
 NIP. 19601125 199203 2 001